

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adjie, H. (2007). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darus, L. H. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Diantha. (2018). *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Djunaedi, A. (2017). *Kode Etik dan Disiplin Profesi Notaris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efiendi, D. J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Gunanegara. (2020). *Hak Negara Dan Warga Negara Atas Tanah Di Berbagai Negara*. Jakarta: Gunanegara.
- Hans Kelsen. (2006). *Diterjemahkan oleh Rasul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Harsono, B. (1995). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, R. (2011). *Etika Profesi Hukum dan Peran Notaris*. Bandung: Alumni.
- Ishaq, S. M. (2017). *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isharyanto. (2016). *Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Kartini Muljadi, & Gunawan Widjaja. (2003). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

- Kie Tan Tong. (2007). *Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Kurniawan, L. (2017). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setar Press.
- Limbong, B. (2015). *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Ngani, N. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Rahayu, C. R. (2019). Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing. *Indonesian Notary*, 1(1), 7.
- Salim, H. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif*. Jakarta: Kencana.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sodiki, A., & Maladi, Y. (2009). *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: Mahkota Kata.
- Soegondo Notodirejo. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerodjo, I. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Hukum*. Pasuruan: Quara Media.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Adi Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi. (2016). *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yovita, A., Mangesti, & Bernard, L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Adnyani, N. S. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 463-473.

Adnyani, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.

Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 216-235.

Anang Dony Irawan, & Fadli Fadli. (2020). Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Study*, 1(1), 7-13. R

Azhari, M. E., & Djauhari. (2018). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok. *Jurnal Akta*, 5(1), 43-50.

Dantes, K. F., & Hadi, I. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 486-494.

Dantes, K. F., Adnyani, N. S., Hartono, M. S., Hadi, I. A., Parwati, N. E., & Asrini, N. P. (2025). Implementing Commodity Policy to Realize Ababi Community Welfare and Inclusive Development. *The 7th International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2025)*, 221(03007), 1-6.

Dantes, K. F., & Hadi, I. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.

- Dantes, K. F., & Hadi, I. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 80-88.
- Desi Syamsiah, & Reky Nurviana. (2022). Perspektif Hukum Eksekusi Atas Objek Dibebani Hak Tanggungan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(3), 563-568.
- Dian Aries Mujiburohman. (2016). Probelaamtika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 151-164.
- Eddy Nyoman Winarta, I Gusti Ngurah Wairocana, & I Made Sarjana. (2017). Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 43-57.
- Hadi, I. A., Dantes, K. F., Widari, R. A., Parwati, N. E., & Lestari, N. (2025). Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 : Proses dan Pertanggungjawaban Notaris di Kabupaten Tabanan. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2), 244-261.
- I Dewa Agung Dharma Jastrawan, & I Nyoman Suya. (2019). Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Oleh Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-15.
- I Made Suwitra. (2014). Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights and Its Affair. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(6), 445-454.
- Indah Jacinda, Jason Jusuf, & Verlin Ferdina. (2018). Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 61-78.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1-9.
- Kusuma, P. R., & Ariestu, P. D. (2025). Model Pembinaan Yang Tepat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Supaya Menimbulkan Efek

- Jera di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(1), 1-10.
- Madyastuti, R. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 5(3), 711-731.
- Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(3), 64-75.
- Maria Nadea Ambarsari, & Achmad Busro. (2023). Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali. *Jurnal Notarius*, 16(1), 274-278.
- Maria Stephannie Halim. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 96-109.
- Nina Paputungan. (2016). Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. *Lex Privatum*, 4(2), 13-25.
- Parwati, N. E., Adnyani, N. S., & Hadi, I. A. (2025). Legal Implications of Contract Marriage Between Foreign Nationals and the Indigenous People of Bali. *The 7th International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2025)*, 221(03012), 1-11.
- Poae, F. C., Memah, H. R., & Lambonan, M. L. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis*, 8(4), 115-124.
- Rahayu, C. R. (2019). Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Kepemilikan Warga Negara Asing. *Indonesian Notary*, 1(1), 7.
- Santoso, U. (2017). Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. *Jurnal Perspektif*, 22(1), 41-54.
- Sukmaningsih, N. I. (2024). Konflik dan Harmonisasi Penolakan Warisan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali:

Studi Tentang Hak dan Kewajiban Ahli Waris. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 12(1), 77-87.

Winardi, M. (2017). Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Jurnal Repertorium*, 4(1), 61-72.

Windari, R. A., Sudiatmaka, K., & Arsadi, I. P. (2018). Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustitia*, 1(1), 21-32.

Windari, R. A., Adnyani, N. S., Dantes, K. F., Suastika, I., Hadi, I. A., & Asrini, N. P. (2025). Legal Strengthening of Village Credit Institutions to Drive Bali's Economy Through Tri Hita Karana. *The 7th International Conference on Law, Social Sciences and Education (ICLSSE 2025)*, 221(03009), 1-6.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1442).

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.

